



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 356 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 117 TAHUN 2021
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa sehubungan adanya penyesuaian terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 117 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 223);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 705);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 117 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024.

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 117 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2023
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH NOMOR 117 TAHUN 2021
TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2020-2024

NOMOR : 356 TAHUN 2023

TANGGAL : 24 OKTOBER 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional. RB merupakan salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari Pemerintah. Adapun arahan Presiden terkait RB meliputi tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Tindak lanjut dari arahan Presiden dapat terlaksana dan terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam upaya tata kelola pemerintahan yang langsung ditujukan ke akar permasalahan, dan bukan sekedar agenda rutin dan administratif tanpa memberikan daya ungkit kongkret.

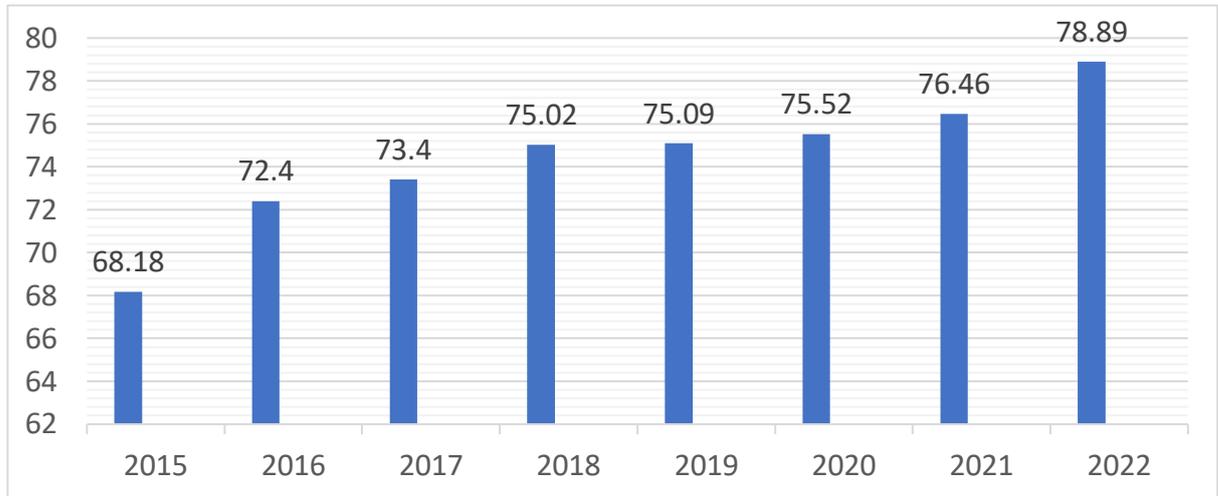
Penerapan RB Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sesuai dengan *Road Map* RB LKPP Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020 – 2024. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* RB 2020-2024, LKPP perlu menyesuaikan melalui penajaman *Road Map* RB 2020-2024.

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari *Road Map* RB 2020–2024 ialah sebagai berikut:

- 1) Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam *Road Map* RB Nasional belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.
- 2) Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB.
- 3) Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
- 4) Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan RB, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

LKPP secara konsisten selalu meningkatkan indeks RB. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik indeks RB LKPP 2015 – 2022 berikut ini:

Grafik 1. Indeks RB LKPP 2015 - 2022



Dalam pelaksanaan RB, LKPP bekerjasama dengan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perbaikan Reformasi Birokrasi. Pemangku kepentingan LKPP selaku pihak yang menerima pelayanan LKPP ialah yang sesungguhnya dapat merasakan perubahan dari segala upaya LKPP dalam memperbaiki RB.

1.2 Tujuan

Secara garis besar, *Road Map* RB LKPP harus mampu menjabarkan secara kongkret visi, misi dan prioritas pembangunan nasional serta mampu menjawab isu strategis dalam pengelolaan tata kelola Pemerintahan yang belum terjawab pada *Road Map* RB sebelum perubahan. Mengingat masih banyaknya permasalahan yang belum terjawab pada *Road Map* RB sebelum perubahan, maka dilakukan penajaman atas *Road Map* RB LKPP Tahun 2020 – 2024 dengan tujuan sebagai berikut:

1) Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB

Penajaman *Road Map* RB 2020-2024 bertujuan untuk mengakselerasikan pelaksanaan RB sehingga tujuan dan sasaran strategis RB yang telah disepakati oleh LKPP dalam berdampak secara komperhensif oleh masyarakat.

2) Mendapatkan *Road Map* RB yang lebih komperhensif dan sesuai dengan kebutuhan

Penajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang optimal, dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan LKPP dan masyarakat. Upaya penajaman terhadap *Road Map* RB LKPP 2020-2024 disesuaikan dengan kebutuhan LKPP dalam menghadapi kondisi lingkungan

yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

3) Mendapatkan *Road Map* RB yang mampu menciptakan integrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam LKPP

Pelaksanaan RB di lingkungan LKPP memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, dari unsur Pemerintah maupun luar pemerintah. LKPP menjadi *leading sector*/Instansi pengampu salah satu indeks yang turut diperhitungkan dalam perhitungan indeks RB, yaitu Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal 'BAIK.' LKPP telah berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan kebijakan, pembinaan dan implementasi, hingga monitoring dan evaluasi atas program yang diampu.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI LKPP

2.1 Kondisi Eksisting Sesuai *Road Map* RB

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* RB nasional, yaitu *Road Map* RB Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Pelaksanaan RB saat ini telah memasuki periode ketiga sekaligus terakhir. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi, efisiensi anggaran, sampai dengan pengintegrasian pelayanan publik dalam *mall* pelayanan publik. Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari *Grand Design* RB Nasional Tahun 2010– 2025.

Grand Design RB LKPP dimulai dengan tersusunnya *Road Map* RB tahun 2015-2019. Selanjutnya dilakukan perubahan *Road Map* RB tahun 2020-2024 untuk menyesuaikan arah kebijakan RB Nasional. Tahun 2023 disusun kembali *Road Map* RB untuk menajamkan *Road Map* RB 2020-2024 sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

LKPP terus berkomitmen untuk meningkatkan hasil evaluasi RB setiap tahunnya. Hal tersebut dibuktikan dengan predikat “BB” dan skor 78,89 pada tahun 2022. Secara detil hasil pelaksanaan RB LKPP tahun 2022 tersaji dalam tabel tujuan dan sasaran strategis RB LKPP tahun 2020-2024, sebagai berikut:

Tujuan RB 2020-2024	Indikator Tujuan	Skala	Target Road Map RB Nasional 2024	Target Renstra LKPP 2024	Kondisi Eksisting 2022
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	0-100	Baik (>70 – 80)	A	78,89 (BB)
	Jumlah PDN yang tayang pada katalog elektronik	-	-	4.800.000 Produk	5.568.406 Produk (2023)
	Jumlah K/L/Pemda yang memiliki tata kelola pengadaan "Baik"	0-100	-	155 K/L/PD	67 K/L/PD

Sasaran Strategis RB 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Skala	Target Road Map RB Nasional 2024	Target Renstra LKPP 2024	Kondisi Eksisting 2022
Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	0-5	Baik (2,60 - <3,50)	Baik	3,21 (Baik)
	Capaian Akuntabilitas Kinerja	0-120	Baik (60-70)	Sangat Baik	70,10 (Sangat Baik)
	Capaian Akuntabilitas Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP
Budaya Birokrasi BerAKHLAK	Nilai Survei <i>Employer Branding</i>	N/A	7,66 %	7,66%	-

dengan ASN yang Profesional	Indeks Implementasi BerAKHLAK	0-100	67,14	67,14	60,5% (B)
	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	0-100	81,10	85	84,68
	Indeks Kepuasan Masyarakat	0-100	88,06	88,06	81,79 (baik)

BAB III

Agenda Reformasi Birokrasi LKPP

A. Penetapan Tujuan dan Sasaran RB

Secara umum, tujuan dan sasaran RB akan diarahkan untuk menjawab isu Tata Kelola Pemerintahan yang belum berkontribusi secara signifikan dalam capaian pembangunan, masih adanya kualitas pelayanan publik yang belum prima, masih banyaknya tindak pidana korupsi yang terjadi di tingkat daerah maupun pusat, serta ketertinggalan birokrasi dengan negara lain. Strategi yang akan diterapkan untuk menjawab isu tersebut ialah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah (*agile*), kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi dan organisasi yang berorientasi pada kinerja, pelayanan serta individu ASN yang lebih profesional.

1. Tujuan

Road Map RB LKPP disusun berdasarkan Road Map RB nasional. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Road Map RB 2020-2024 pada tanggal 4 Mei 2020 dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Road Map RB LKPP, Road Map RB LKPP merupakan petunjuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan LKPP. Tujuan Road Map RB LKPP sebelum penajaman ialah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Hasil yang diharapkan dari RB ialah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi. Tiga sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah:

- 1) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
- 2) Birokrasi yang Kapabel; dan
- 3) Pelayanan Publik yang Prima.

Sedangkan tujuan *Road Map* RB LKPP setelah penajaman sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25

Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, mengacu pada permasalahan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 dimaksud yaitu “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

2. Sasaran

Berkaitan dengan sasaran, pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis RB, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* ialah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis RB ialah sebagai berikut:

- 1) Terciptanya tata kelola pemerintah digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek *hard element*. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.
- 2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek *soft element*. Sasaran ini berkaitan dengan

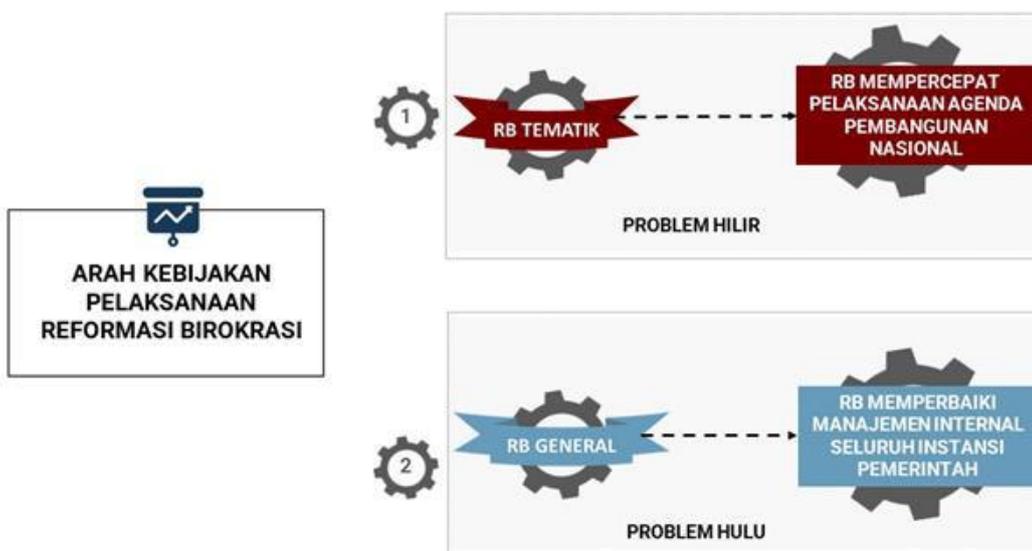
budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

3. Penajaman terhadap Kegiatan Utama

Pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada *Road Map* RB 2022-2024 setelah penajaman, kegiatan RB tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan tersebut melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

4. Penajaman terhadap Fokus Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Ekspektasi masyarakat dan dunia usaha atas pelaksanaan RB adalah menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. RB juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar hal tersebut, *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan "*double track*", yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik.



Gambar 1. *Double Track* Fokus Pelaksanaan RB

Sumber: Kementerian PAN RB

B. Perencanaan RB General

Secara umum pelaksanaan RB General dibagi ke dalam dua tingkatan, yaitu Nasional dan Instansional. Pada tingkat Nasional, pelaksanaan RB terdiri atas level makro dan meso. Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan RB secara Nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program RB pada level meso dan mikro. Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan kebijakan RB oleh instansi yang ditetapkan sebagai *leading institution*. Instansi tersebut bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaannya, serta menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN). LKPP sebagai Instansi yang menjadi *leading sector* dalam program Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal 'Baik', telah mendukung PN 7 - PP 4 (Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola) – KP 2 (Transformasi pelayanan publik) dengan strategi untuk meningkatkan kualitas kebijakan PBJ.

1. Strategi Level Mikro

Pada tingkat instansional atau mikro, mencakup implementasi kebijakan/program RB LKPP. Kebijakan tersebut harus mengacu kepada kebijakan RB secara nasional melalui program makro,

program meso, dan pelaksanaan program atau inovasi lainnya yang masih menjadi bagian dari upaya percepatan RB yang selaras dengan program RB nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024.

Pada implementasinya setiap pelaksanaan RB pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama LKPP. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program mikro RB telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit organisasi LKPP. Sedangkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB di internal dilaksanakan oleh Inspektorat LKPP. Dalam rangka untuk memastikan kegiatan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya sesuai dengan yang diharapkan, LKPP membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal LKPP. Selain itu, untuk memastikan bahwa program RB internal LKPP berjalan secara masif dan dilaksanakan sampai unit-unit organisasi, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit organisasi sehingga program RB internal dilaksanakan secara bersama-sama. Kegiatan utama RB General LKPP Tahun 2023-2024 tercantum pada lampiran 1.

C. Penetapan Tema dan Target RB Tematik

Konsep RB Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan. Teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

LKPP menetapkan 2 (dua) tema RB Tematik tahun 2023-2024 yang dalam pelaksanaannya berkolaborasi dengan *stakeholders*, dengan rincian sebagai berikut:

1. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

LKPP berkomitmen dalam melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) hal tersebut dibuktikan dengan Percepatan

Prioritas Aktual Presiden. Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan RB dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual Presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

2. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Secara umum, pelaksanaan RB Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan RB Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional.

Gambaran lengkap RB Tematik LKPP dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	skala	Baseline	Target Tahunan		Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana	
					2022	2023	2024		Koordinator	Pelaksana
1	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Tersedianya kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Regulasi yang mendukung peningkatan penggunaan PDN)	Jumlah rumusan kebijakan pengadaan umum yang berkualitas	-	3	6	4	Per tahun	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Unit Organisasi terkait
2		Instansi/proyek yang Mendapatkan Pendampingan/ Diberikan Pendapat Dalam PBJ Khusus	Jumlah Instansi/proyek yang Mendapatkan Pendampingan/Diberikan Pendapat Dalam PBJ Khusus	Lembaga	10	10	13	Akumulatif	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Unit Organisasi terkait

No	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	skala	Baseline	Target Tahunan		Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana	
					2022	2023	2024		Koordinator	Pelaksana
3		Tersusunnya model Dokumen PBJ Khusus yang memuat ketentuan PDN dan UMK-K	Jumlah Model Dokumen PBJ Khusus	NSPK	3	3	3	Nominal (Jumlah)	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Unit Organisasi terkait
4		Meningkatnya jumlah Pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJ	Jumlah pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJ	Pelaku Usaha	120	252	397	Akumulatif	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	Unit Organisasi terkait
5		Meningkatnya kualitas sistem informasi non <i>e-purchasing</i> yang mendorong penggunaan produk dalam negeri dan partisipasi UKM	Persentase realisasi belanja pengadaan untuk UMK-K melalui Non <i>E-Purchasing</i>	Persentase	-	38%	40%		Direktorat Sistem Pengadaan Digital	Unit Organisasi terkait
6		Meningkatnya jumlah produk dalam negeri yang tayang pada katalog elektronik	Jumlah produk dalam negeri yang tayang pada katalog elektronik	Produk (Juta)	1	4,2	4,8	Akumulasi	Direktorat Pasar Digital Pengadaan	K/L/Pemda

No	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	skala	Baseline	Target Tahunan		Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana	
					2022	2023	2024		Koordinator	Pelaksana
7		Terwujudnya peningkatan jumlah transaksi Katalog Elektronik	Persentase realisasi belanja pengadaan PDN	Persentase	-	88%	90%		Direktorat Pasar Digital Pengadaan	K/L/Pemda
			Jumlah transaksi belanja pengadaan pemerintah pada katalog elektronik	Rupiah	-	200 T	250 T		Direktorat Pasar Digital Pengadaan	K/L/Pemda
8		Jumlah SDM PBJ yang mengikuti sertifikasi kompetensi	Jumlah SDM PBJ yang mengikuti sertifikasi kompetensi	Orang	3400	5480	5480		Direktorat Sertifikasi Profesi	K/L/Pemda
9		Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN	Jumlah Kementerian/Lembaga yang melaksanakan belanja PDN	Jumlah K/L yang mendapat advokasi terkait penerapan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN	-	61	68	Target Tahunan	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat

No	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	skala	Baseline	Target Tahunan		Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana	
					2022	2023	2024		Koordinator	Pelaksana
10		Terwujudnya Peningkatan belanja pengadaan untuk UMK-K	Jumlah Kementerian/Lembaga yang melakukan belanja pengadaan melalui UMK-K	Jumlah K/L yang mendapat Advokasi terkait penerapan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K	-	50	60	Target Tahunan	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
11		Terlaksananya kegiatan <i>Probity Advice</i> yang menekankan penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Paket yang dilakukan <i>Probity Advice</i>	Jumlah Paket	15	15	15		Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
12		Meningkatnya Kompetensi SDM di K/L/Pemda Mengenai Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Tematik Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Pelaku Pengadaan - Nasional	24	800	880	Per tahun	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa

No	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	skala	Baseline	Target Tahunan		Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana	
					2022	2023	2024		Koordinator	Pelaksana
13		Meningkatnya Kompetensi SDM di K/L/Pemda Mengenai Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Jumlah Peserta <i>Community of Practice</i> dengan Tema Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Pelaku Pengadaan - Nasional	-	1000	700		Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
1	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan pengadaan	Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP	K/L/Pemda	-	518	624		Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan	K/L/Pemda
2		Terwujudnya peningkatan kualitas penerapan tata kelola pengadaan	Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan non e-purchasing	K/L/Pemda	-	350	450		Direktorat Sistem Pengadaan Digital	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
3			Jumlah LPSE yang menggunakan aplikasi SPSE Terpusat	LPSE	170	300	450		Direktorat Sistem Pengadaan Digital	Direktorat Sistem Pengadaan Digital

No	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	skala	Baseline	Target Tahunan		Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana	
					2022	2023	2024		Koordinator	Pelaksana
4			Persentase integrasi sistem informasi pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, dan pengelolaan penyedia dengan sistem informasi lainnya	Persen	63	80	100		Direktorat Sistem Pengadaan Digital	Seluruh Unit Organisasi
5		Terlaksananya integrasi sistem <i>E-Purchasing</i>	Jumlah Integrasi yang sudah dilakukan	Sistem yang terintegrasi	4	5	6	Pada tahun 2022 belum menjadi target	Direktorat Pasar Digital Pengadaan	Direktorat Pasar Digital Pengadaan
6		Terlaksananya pelayanan verifikasi Penilaian Mandiri Tingkat Kematangan UKPBJ melalui aplikasi SIMKU	Jumlah UKPBJ yang terverifikasi	UKPBJ	190	290	382	Per tahun	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
7		Tersedianya Sistem Pengaduan pada APIP K/L/PD untuk Meningkatkan	Jumlah APIP K/L/PD yang telah memiliki sistem pengaduan dan	APIP K/L/PD	25	40	65		Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	K/L/PD

No	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	skala	Baseline	Target Tahunan		Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana	
					2022	2023	2024		Koordinator	Pelaksana
		Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan Kontrak	ditingkatkan kapasitasnya							
8		Layanan Pemberian Keterangan Ahli Pengadaan melalui Aplikasi LOKAL	Persentase permohonan yang terlayani	Persentase	100	100	100		Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	K/L/PD

BAB IV

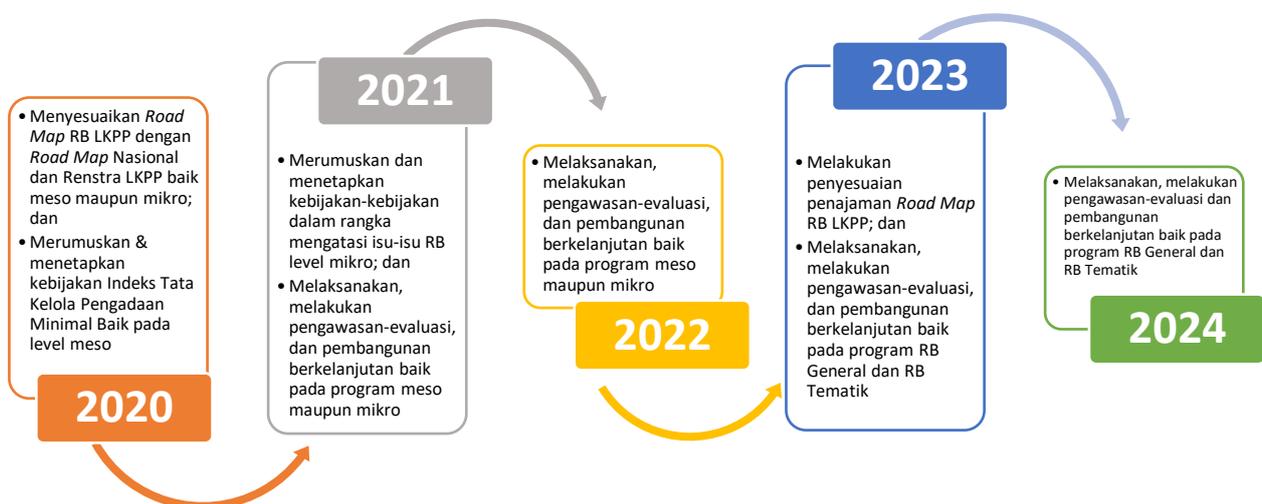
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI LKPP

TAHUN 2020 - 2024

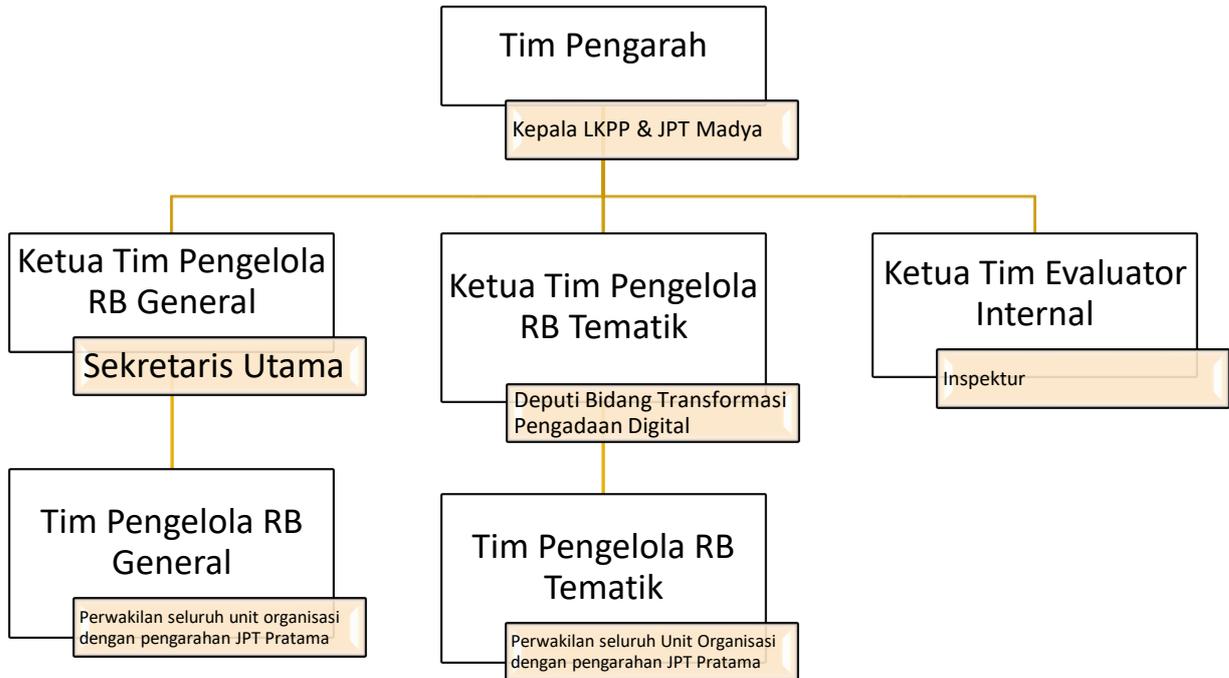
4.1. Pelaksanaan RB

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran *Road Map* RB 2020-2024, strategi pelaksanaan RB harus ditetapkan sebaik mungkin. Penajaman *Road Map* RB 2020-2024 ini menetapkan hal-hal yang belum ada pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman. Penajaman tersebut antara lain adalah ditetapkannya sasaran RB General dan RB Tematik. RB General berfokus pada perbaikan sistem dan manajemen internal instansi guna menyelesaikan permasalahan tata kelola birokrasi. RB Tematik berfokus pada isu-isu prioritas presiden yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, peran serta setiap unit organisasi LKPP dalam pelaksanaan RB General dan RB Tematik juga dimonitor, sehingga RB yang dilakukan tidak hanya berada di permukaan saja, tetapi juga melibatkan seluruh pimpinan dan pegawai LKPP. Secara garis besar, strategi pelaksanaan RB LKPP tahun 2020 – 2024 setelah dilakukan penajaman *Road Map* digambarkan sebagai berikut:

Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LKPP Tahun 2020 - 2024



Pelaksanaan RB di lingkungan LKPP akan dikelola oleh pihak-pihak yang tergambar sebagai berikut:



Tim RB LKPP dimulai dari Tim Pengarah yang terdiri atas Kepala LKPP beserta seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Selanjutnya untuk Tim Evaluator Internal adalah Inspektorat yang merupakan APIP untuk melaksanakan evaluasi internal.

Tim Pengelola RB General dikelompokkan berdasarkan dengan tugas dan fungsi unit organisasi dengan melihat keterlibatan langsung dengan kegiatan utama terhadap pelaksanaan RB tahun 2023-2024 pada level mikro sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023. Tim Pengelola RB Tematik ditunjuk berdasarkan kesesuaian tugas dan fungsi unit organisasi yang dapat memberikan dukungan atas tema RB Tematik yang telah ditentukan.

4.2. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi RB

Tujuan dari dilakukannya monitoring dan evaluasi RB adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan RB dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Fokus dari monitoring dan evaluasi RB General adalah untuk menilai kemajuan perbaikan tata kelola di internal LKPP, sedangkan fokus dari monitoring dan evaluasi RB Tematik adalah untuk menilai sejauh mana perbaikan tata kelola yang dilakukan dapat memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

Monitoring dan evaluasi internal dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan RB. Pada tahap perencanaan RB, monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan *Road Map* dan Rencana Aksi RB memiliki kualitas yang baik dan layak menjadi pedoman dalam pelaksanaan RB serta berisi solusi atau pemecahan masalah tata kelola yang terkait dengan isu dan permasalahan. Pada tahap pelaksanaan RB, monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam *Road Map* dan Rencana Aksi RB berjalan sesuai dengan rencana serta memberikan saran dan rekomendasi dalam menghadapi kendala yang dihadapi.

Mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RB General dan RB Tematik dilaksanakan secara sinergis oleh Tim Pengelola dan Tim Evaluator Internal sebagai berikut:

A. Tim Pengelola RB General

- a. melakukan monitoring secara berkala setiap triwulan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi RB General yang telah disusun; dan
- b. menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan.

B. Tim Pengelola RB Tematik

- a. melakukan monitoring secara berkala setiap triwulan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi RB Tematik yang telah disusun; dan
- b. menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan.

C. Tim Evaluator Internal

- a. melakukan reuiu atau evaluasi perencanaan (*ex-ante*) terhadap penyusunan *Road Map* dan Rencana Aksi pelaksanaan RB;
- b. melakukan monitoring, mengukur ketercapaian target, dan menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi pelaksanaan (*on going*) serta menilai kualitas pengelolaan RB General dan RB Tematik secara berkala setiap triwulan;
- c. memberikan rekomendasi untuk mengatasi kendala pelaksanaan RB General dan RB Tematik kepada Tim Pengelola RB; dan
- d. menyampaikan ringkasan hasil monitoring dan evaluasi kepada Evaluator Nasional melalui Portal Reformasi Birokrasi Nasional.

BAB V

PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi LKPP Tahun 2020 – 2024 merupakan bentuk operasionalisasi *Road Map* RB Nasional di lingkungan LKPP. *Road Map* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali ini menjelaskan target RB yang ingin dicapai pada akhir periode *Road Map* ini, yaitu tahun 2024.

Perbedaan pada penajaman *Road Map* RB LKPP Tahun 2020 – 2024 yakni arah RB yang menjadi RB General dan RB Tematik. Penajaman *Road Map* RB ini diharapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya guna mencapai perubahan positif pada semua area perubahan Reformasi Birokrasi di LKPP.

Dokumen penajaman *Road Map* RB LKPP Tahun 2020 – 2024 ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh Unit Organisasi LKPP dalam mendukung pelaksanaan RB General maupun RB Tematik yang menjadi dasar program kegiatan RB LKPP.

KEGIATAN UTAMA REFORMASI BIROKRASI GENERAL LKPP TAHUN 2023-2024

No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Capaian		Target Tahunan		Keterangan	Unit Kerja Pelaksana	
					2021	Baseline (2022)	2023	2024		Koordinator	Pelaksana
Sasaran Strategis 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel											
1	Terimplementasinya kebijakan penyederhanaan birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (penyederhanaan struktur organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	LKPP telah melakukan penyederhanaan birokrasi di tahun 2021	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Seluruh Unit Organisasi
2	Terimplementasinya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Seluruh Unit Organisasi

No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Capaian		Target Tahunan		Keterangan	Unit Kerja Pelaksana	
					2021	Baseline (2022)	2023	2024		Koordinator	Pelaksana
3	Terimplementasinya kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	0-5	3,14	3,21	Baik	Baik		Pusat Data dan Informasi	Seluruh Unit Organisasi
			Tingkat kerja implementasi inisiatif strategi Arsitektur SPBE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Pusat Data dan Informasi	Seluruh Unit Organisasi
4	Terimplementasinya sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan AKIP	Pelaksanaan SAKIP yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Biro Perencanaan dan Keuangan	Seluruh Unit Organisasi
			Nilai SAKIP	0-100	64,37 (Baik)	70,10 (Sangat Baik)	Sangat Baik	Sangat Baik	Indikator KU terdapat pada Renstra LKPP	Biro Perencanaan dan Keuangan	Seluruh Unit Organisasi
5	Terimplementasinya pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan pembangunan ZI	0-100	1/12=8,3%	3/12=25%	4/12=33,3%	5/12=41,6%		BHOSDM dan Inspektorat	Unit Organisasi yang diusulkan

No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Capaian		Target Tahunan		Keterangan	Unit Kerja Pelaksana	
					2021	Baseline (2022)	2023	2024		Koordinator	Pelaksana
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	0-5	3	3	Terdefinisi	Terdefinisi		1. Inspektorat 2. Sekretariat Utama	Seluruh Unit Organisasi
7		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	0-100	100	100	100	100		Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Seluruh Unit Organisasi pemilik Pelayanan Publik
8		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas	0-100	86,23 (sangat baik)	84,68 (Sangat Baik)	Sangat Baik	Sangat Baik		Inspektorat	Seluruh Unit Organisasi
9	Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi	Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	0-100	59,96 (Cukup)	Cukup	Baik	Baik	Penilaian IKK dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali, dan	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Seluruh Unit Organisasi pemilik kebijakan

No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Capaian		Target Tahunan		Keterangan	Unit Kerja Pelaksana	
					2021	Baseline (2022)	2023	2024		Koordinator	Pelaksana
									penilaian terakhir di tahun 2021		
10		Pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	0-100	-	94,25 (Istimewa)	Istimewa	Istimewa	Target tahun 2023 dan 2024 tercantum dalam Renstra perubahan Sekretariat Utama	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Seluruh Unit Organisasi
11	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat digitalisasi Arsip	0-100	-	70 (Baik)	Sangat Baik	Memuaskan		Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	
12		Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	0-5	N/A	1,98 (Cukup)	Cukup	Baik		Pusat Data dan Informasi	Seluruh Unit Organisasi
13	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah,	Penguatan Pengadaan Barang	Indeks Tata Kelola Pengadaan	0-100	85,28	87,60 (Baik)	Sangat Baik	Sangat Baik		Direktorat Perencanaan Transformasi,	Biro Hubungan Masyarakat

No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Capaian		Target Tahunan		Keterangan	Unit Kerja Pelaksana	
					2021	Baseline (2022)	2023	2024		Koordinator	Pelaksana
	pengelolaan keuangan dan aset	dan Jasa Pemerintah								Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan	dan Umum (UKPBJ)
14		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP		Biro Perencanaan dan Keuangan	Seluruh Unit Organisasi
			Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	0-100	80,93%	81,20%	82%	85%		Inspektorat	Seluruh Unit Organisasi
			Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	0-100	88,02	92,89 (Baik)	Baik	Baik		Biro Perencanaan dan Keuangan	Seluruh Unit Organisasi
			Indeks Pengelolaan Aset	0-4	3,14	3,38	3,45	3,5	Indikator KU tercantum dalam Renstra LKPP	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Seluruh Unit Organisasi

No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Capaian		Target Tahunan		Keterangan	Unit Kerja Pelaksana	
					2021	Baseline (2022)	2023	2024		Koordinator	Pelaksana
Sasaran Strategis 2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional											
15	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan transformasi Jabatan Fungsional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Seluruh Unit Organisasi
16	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Seluruh Unit Organisasi
17	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	Pengelolaan kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Seluruh Unit Organisasi

No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Capaian		Target Tahunan		Keterangan	Unit Kerja Pelaksana	
					2021	Baseline (2022)	2023	2024		Koordinator	Pelaksana
18	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	0-400 (0,20-1,00)	0,84 (Sangat Baik)	0,84 (Sangat Baik)	Sangat Baik	Sangat Baik	Penilaian Sistem Merit dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali, dan penilaian terakhir di tahun 2021	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Seluruh Unit Organisasi
19		Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	Indeks BerAKHLAK	0-100	N/A	60,5%	63%	67,14%		Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Seluruh Unit Organisasi
			Nilai Survei <i>Employer Branding</i>		N/A	N/A	6,9%	7,2%	7,66%		Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Capaian		Target Tahunan		Keterangan	Unit Kerja Pelaksana	
					2021	Baseline (2022)	2023	2024		Koordinator	Pelaksana
20		Pelayanan Publik Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	0-100	81,01	81,79	Baik	88,06 (Baik)		Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Seluruh Unit Organisasi Pengelola Layanan Publik
			Indeks Pelayanan Publik	0-5	4,25 (Sangat Baik)	4,25 (Sangat Baik)	Sangat Baik	Sangat Baik		Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Seluruh Unit Organisasi Pengelola Layanan Publik

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI